DINAMIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI KUWAIT DALAM BIDANG PERWAKAFAN DAN WASIYYAT AL-WAJIBAH

M.Rullyan Surachman¹, Syarifuddin², Ali Murtadho³

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3}

Email: surachmanrully@gmail.com syarifuddin@iain-palangkaraya.ac.id, ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 2	<p>This study explores the dynamics of Islamic family law reform in Kuwait, focusing on two main areas: waqf (Islamic endowment) and obligatory bequest (wasiyyat al-wajibah). As a country that adopts Islam as its legal foundation, Kuwait has undertaken several reforms in family law since gaining independence from British protection in 1961. These reforms include the conditional prohibition of family waqf and the implementation of obligatory bequests through the 1971 legislation. Using a qualitative approach and library research method, this study examines legal regulations, Islamic jurisprudence texts, and official Kuwaiti documents. The findings indicate that although Kuwait's family law reform is relatively slow compared to other Muslim countries, it has successfully codified a legal framework based on Sharia to regulate waqf assets and inheritance fairly. This reform highlights the state's role in ensuring family welfare and justice in wealth distribution within modern Muslim society.</p> <p>Keywords : Family Law, Kuwait, Islamic Legal Reform, Waqf, Obligatory Bequest.</p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam di Kuwait dengan fokus pada dua bidang utama, yaitu perwakafan dan wasiyyat al-wajibah. Kuwait, sebagai negara yang menjadikan Islam sebagai dasar hukumnya, telah melakukan berbagai pembaharuan hukum keluarga sejak merdeka dari protektorat Inggris tahun 1961. Pembaruan ini antara lain mencakup pelarangan wakaf keluarga dalam kondisi tertentu dan pengaturan wasiat wajibah melalui undang-undang tahun 1971. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka terhadap berbagai peraturan hukum, kitab fikih, dan dokumen resmi negara Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi hukum keluarga di Kuwait tergolong lambat dibandingkan negara Muslim lain, namun Kuwait berhasil menyusun kerangka hukum yang berbasis pada syariat Islam untuk mengatur aset wakaf dan warisan secara adil. Pembaruan ini memperlihatkan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan keluarga dan keadilan distribusi harta warisan dalam masyarakat Muslim modern.

Kata Kunci : Hukum Keluarga, Kuwait, Pembaruan Hukum Islam, Wakaf, Wasiat Wajibah.

A. PENDAHULUAN

Alquran sebagai sumber utama hukum Islam memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris, wasiat dan sebagainya sebanyak 70 ayat.¹ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur dalam syariat Islam. Hukum keluarga dalam literatur fikih biasa dikenal dengan sebutan *al- ahwal al-syakhs}iyyah*. *Ahwal* adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) *al-hal*, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan *al-syakhs}iyyah* berasal dari kata *al- syakhsu* - jamaknya *asykhas* atau *syukhus* - yang berarti orang atau manusia (*al-insan*). *Al-syakhs}iyyah* berarti kepribadian atau identitas diri pribadi (jati diri).² Hal-hal pribadi yang dimaksud adalah masalah-masalah di mana pribadi menjadi topiknya atau undang-undang yang mengendalikan masalah-masalah pribadi.³

Olehnya itu hukum keluarga bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu keluarga (rumah tangga) yang berkenaan dengan masalah-masalah tertentu (pribadi), seperti pernikahan, keturunan (*nasab*), biaya hidup (*nafaqah*), pemeliharaan anak (*hadanah*), perwalian, kewarisan dan wasiat. Apabila dikaitkan dengan Islam adalah hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan internal sebuah keluarga muslim.

Hukum keluarga Islam selama berabad-abad diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat Islam. Selain itu, kajian terhadap hukum keluarga Islam tetap penting dan terus berkembang juga karena dari persoalan-persoalan inilah selalu muncul perdebatan antara kekuatan konservatif dengan kekuatan-kekuatan progresif di dunia Islam.⁴ Hukum keluarga dalam implementasinya dalam kehidupan masih membutuhkan pengembangan selaras akibat adanya respon terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu al-Jauziyah Qayyum bahwa perubahan ide-ide atau pemikiran hukum dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, ruang, keadaan, niat dan adat).⁵ Olehnya itu, eksistensi hukum keluarga sangatlah penting dalam sebuah negara.

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 34-35.

² Muhammad Rawas Qal'ahji, et al., *Mu'jam Lugah al-Fuqaha' 'Arabi - Inklizi - Afransi* (Bairut: Lubnan, 1416 H/1996 M.), hlm. 230; lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.), hlm. 49-750.

³ Rifyal Ka'bah, "Beberapa Permasalahan dalam Al-Ahwal Asy-Syakhs}iyyah (Hukum Keluarga) Mesir," Makalah (Jakarta: Departemen Agama RI, 19 September 2002), hlm. 2.

⁴ J. N. D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husain, *Hukum Islam di Dunia Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 46.

⁵ Ibnu Qayyum al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaffiqin al-Rab al-'Alamin*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 14.

Muhammad Amin Summa menjelaskan pemberlakuan hukum keluarga dibedakan menjadi tiga hal, yaitu *Pertama*, hukum keluarga dilakukan oleh negara secara tradisional, memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan, misalnya negara Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya; *Kedua*, hukum keluarga diberlakukan oleh negara dengan telah digantikannya dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, misalnya negara Turki dan Albania; *Ketiga*, negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam, misalnya negara Mesir, Sudan, Jordan, Siria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan.⁶

Permasalahan hukum keluarga misalnya dari segi perwakafan. Perwakafan merupakan salah satu warisan Islam yang memiliki peran aktif dalam menumbuh- kembangkan kesejahteraan umat.⁷ Konsep pengelolaan wakaf telah dilaksanakan oleh negara-negara muslim di dunia, misalnya negara Mesir Kuno, dinasti-dinasti Islam seperti Saljuk dan Turki. Di negara Mesir kuno penerapannya dengan konsep misalnya para raja mempersembahkan tanah atau barang yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai tempat menyembah dewa-dewa mereka, dan juga digunakan untuk mengumpulkan sumbangan berupa uang yang kemudian desahkan untuk para pendeta. Juga terdapat wakaf keluarga dengan konsep, anak tertualah yang berhak dan atau memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola harta wakaf, dan tidak diperbolehkan memperjualbelikan harta tersebut.⁸

Wakaf pada masa dinasti Islam memiliki peran signifikan dalam pembangunan negara, misalnya masa Dinasti Saljuk, harta wakaf dimanfaatkan untuk membangun tempat pemberhentian sementara kafilah dagang yang melewati jalur perdagangan, para pedagang diperkenankan untuk beristirahat selama tiga hari tanpa bayaran, dan memperoleh makanan gratis pula.⁹ Wakaf pada masa dinasti Ustmani berkuasa dikenal dengan istilah *wakviye* yang berarti pelayanan publik.¹⁰ Di sini wakaf telah memiliki peran dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan bangunan-bangunan seni budaya. Konsep wakaf dilakukan dengan cara pemilik tanah memberikan Hak bagi seseorang yang ingin memanfaatkan tanah dan

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 162-165.

⁷ Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No.2, 2011, hlm. 14.

⁸ Muhammad Abid al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 17-19.

⁹P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, Vol. IA (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 259.

¹⁰ Tuti A. Najib dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan* (Jakarta: CSRC, 2006), hlm. 50.

kesepakatan di awal bahwa si pengelola dapat mewariskan tanah yang dikelolanya kepada keturunannya. Luas tanah wakaf pada tahun 1923 adalah 2/3 yang merupakan tanah subur.¹¹

Di negara Irak (Kuwait Baghdad) pada masa dinasti Abbasiyyah, wakaf dikelola oleh seorang qodhi yang selalu memonitor wakaf harta bergerak yang ditampung dalam Baitul Mal. Wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi fakir miskin, pada masa ini wakaf memiliki sebuah inovasi dalam pembagian harta wakaf, sehingga harta wakaf juga diperuntukkan untuk tempat-tempat ibadah, pengungsian, perpustakaan, sarana pendidikan, beasiswa bagi para pelajar, gaji bagi para guru dan orang-orang yang memiliki kaitannya dengannya.¹²

Permasalahan lainnya adalah *wasiyyat al-wajibah*. Misalnya di Mesir, Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan *wasiyyat al-wajibah* adalah *Qânûn* No. 71 Tahun 1946. *Wasiyyat al-wajibah* yang termuat dalam undang-undang tersebut berasal dari salah satu hukum agama yang bersifat *taklifi* yakni wajib. Olehnya undang-undang memformulasikan dalam bentuk wasiat yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewaris untuk melaksanakannya. Jika pewaris tidak melaksanakannya, wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹³

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis konsep-konsep hukum keluarga Islam berdasarkan sumber-sumber primer seperti Alquran, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-komparatif dalam mengkaji implementasi hukum keluarga Islam, termasuk praktik wakaf dan *wasiyyat al-wajibah*, di berbagai negara Muslim seperti Mesir, Turki, dan Irak, guna mengetahui dinamika pembaharuan hukum dan peranannya dalam merespons perubahan sosial masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, kitab-kitab fikih, undang-undang negara-negara Muslim, serta tulisan-tulisan ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan perkembangan dan relevansi hukum keluarga Islam dalam konteks modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Kuwait dalam Lintasan Sejarah

¹¹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹² Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Keuangan Islam*, terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), hlm. 33.

¹³ Abu Zahrah, *Syarh Qanun al-Wasiyyah* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978), hlm. 216.

Kuwait merupakan negara yang berbentuk emirat yang terletak di jazirah Arab kawasan Teluk. Negara ini berbatasan dengan Irak di sebelah utara, Teluk Persia di sebelah timur dan Saudi Arabia di sebelah selatan.¹⁴ Wilayahnya 170 km. memanjang dari utara ke selatan dan 90 km dari timur ke barat.¹⁵ Luas negara ini adalah 17.818 km². Ibukota negara ini adalah Kuwait dengan mata uang Dinar. Bahasa resmi negara adalah bahasa Arab, di samping bahasa Inggris. Islam menjadi agama resmi negara dan dipeluk oleh seluruh penduduknya.¹⁶

Walaupun Kuwait adalah negara kecil namun negara ini kaya minyak. Di perut bumi negara daerah Ahmadi (nama kota dekat Irak) ini tersimpan 9 juta ton metrik minyak dengan produksi sebanyak 985 ribu barel per hari. Kuwait juga memiliki 864 m³ gas alam dan sedikit nitrogen dan sulfur. Selain itu, negara ini memiliki hasil perikanan.¹⁷ Islam datang ke negara ini sejak masa Khalifah Umar ibn Khattab (15-30 H.) Islam yang berkembang di negara ini mengikuti aliran Sunni yang bemazhab Maliki dan Hanbali serta minoritas Syi'ah.¹⁸ Data OPEC tahun 2018 menerangkan Kuwait sangat kaya dengan cadangan minyak dan gas alam. Cadangan minyak yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel, merupakan 10% cadangan minyak dunia dan nomor 6 di dunia. Cadangan gas alam sebesar 1,498 triliun meter kubik. Kuwait memiliki sumber air bersih di Al-Rawdatayn dan Al-Shiqāyā, namun tidak mencukupi kebutuhan air bersih nasional. Kebutuhan air bersih didapat melalui penyulingan air laut.¹⁹

Sejarah Kuwait dimulai pada abad XIX setelah pertempuran dengan Kerajaan Usmaniyah (*Ottoman Empire*) yang ingin memperluas daerah jajahan. Dengan bantuan Inggris, pada tahun 1914, Kuwait bisa mempertahankan wilayahnya dan sejak saat itulah wilayah Kuwait menjadi wilayah kekuasaan Inggris sebagai negara protektorat.²⁰

Tahun 1961, Kuwait menjadi merdeka. Enam hari kemudian, Kuwait diklaim sebagai wilayah Irak. Atas bantuan Inggris, Irak akhirnya mundur. Sejak itu pula negara-negara tetangga dalam Liga Arab mengakui kemerdekaan Kuwait. Setelah itu, hubungan Irak dan Kuwait menjadi pulih kembali. Namun pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak sempat

¹⁴ Adolf Grohmann, "Kuwait" dalam M. Th. Houtsma, et al., eds., *E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, vol. 4 (Leiden-New York: E.J. Brill, 1993), hlm. 1172.

¹⁵ Ida Supriyatni, "Kuwait" dalam *Ensiklopedi Nasional*, jil. 9 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 257.

¹⁶ Musthofa, "Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wajibah," dalam H. M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, eds., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 165.

¹⁷ Esposito, *The Modern World*, hlm. 5.

¹⁸ Mahmood, *The Muslim World*, hlm. 4.

¹⁹ Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Kuwait," https://kemlu.go.id/kuwaitcity/id/pages/profil_negara_kuwait/1585/etc-menu (diakses tanggal 21 November 2019).

²⁰ Grohmann, "Kuwait," hlm. 1172; lihat juga *Ensiklopedi Islam*, jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 87-88.

melancarkan agresi yang kedua ke Kuwait, dan harus mundur lagi atas desakan Amerika dan sekutunya enam bulan kemudian.²¹ Mestinya pada tahun kemerdekaan Kuwait, negara yang kaya minyak ini sudah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun karena Uni Soviet dan Irak menentang rencana itu, maka negara ini bisa resmi menjadi anggota PBB baru dua tahun kemudian.²²

Pada saat menjadi wilayah Inggris, Kuwait harus menerima sistem hukum dan administrasi Barat, maka dengan beberapa perubahan, Hukum Inggris (*British-Indian Law*), termasuk *Indian Penal Law* 1980 diterapkan bagi penduduk no Arab di negara ini, sedangkan untuk penduduk Islam masih diberlakukan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga. Sistem hukum di negara ini pada saat ini merupakan perpaduan *British common law*, *French civil law*, *Egyptian civil law* dan hukum Islam (Syariah). Parlemen Kuwait disebut dengan *National Assembly* (Majlis al-Ummah). Anggota *National Assembly* terdiri atas 75 orang, di mana 50 orang yang dipilih lewat suara rahasia dan 25 orang yang diangkat oleh Amir. Masa kerja *National Assembly* adalah 4 tahun; pemilihan *National Assembly* terakhir adalah 26 November 2016. Tugas Parlemen adalah membuat UU dan mengawasi kabinet pemerintahan. Parlemen memiliki hak bertanya dan interpelasi serta mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri.²³

Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Kuwait

Perkembangan hukum di Kuwait mengalami perkembangan yang signifikan (produk hukum tahun 1951-1961). Pada masa kekuasaan Amir Syaikh Abdullah al- Salim al-Sabah banyak disusun hukum baru, di antaranya: 1) Hukum Syariah tentang *waqf* 1951 yang menjadikan wakaf keluarga menjadi dilarang pada keadaan tertentu (*terniable in certain spesified circumtances*); 2) *Civil and Commercial Prosedure Code* 1960; 3) *Civil Code* 1961; 4) *Commercial Code* 1961; 5) *Criminal Procedure Code* 1961; 6) *Law on Damage* 1961.²⁴

Undang-undang yang lahir sejak tahun 1960 adalah karena hasil bantuan ahli hukum Arab yang terkenal, yaitu 'Abd al-Razaq al-Sanhuri yang mulai berkarya di Kuwait sejak tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1959, Amir Kuwait mendapat fasilitas untuk membuat

²¹ Center for Research and Studies on Kuwait, *The Aggression on Kuwait: the Truth and the Tragedy* (t.tp: 1916 H./1996 M.), hlm. 55.

²² Don Peretz, *The Middle East Today*, ed. 4 (New York: Prager, 1986), hlm. 489.

²³ Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Kuwait."

²⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 88.

kodifikasi hukum, maka selama 2 tahun banyak tersusun hukum yang didasarkan pada materi *Aglo-Egyptian* dan *French Legal*.²⁵

Status protektorat Kuwait terhadap Inggris yang berakhir sejak kemerdekaannya pada tanggal 19 Juni 1961,²⁶ maka pada tahun 1962 diundangkan Konstitusi (Undang-Undang Dasar/UUD) negara yang menjadikan syariat (Islam) sebagai dasar hukum di negara ini.²⁷ UUD ini menyatakan Islam sebagai agama negara dan Syariah sebagai sumber hukum utama di negara ini.²⁸ Lebih lanjut UUD ini menyatakan 'keluarga adalah dasar (pembentukan) masyarakat yang dibangun atas dasar agama, akhlak dan patriotisme.'²⁹ Oleh karena itu, hukum-hukum tentang hubungan dan hak milik keluarga harus diatur berdasarkan hukum syariat.

Pada tahun 1963, Komite Nasional Kuwait berdasarkan ketentuan UUD ini berhasil menyusun sejumlah hukum baru dan mengubah beberapa hukum yang berlaku di negara ini sebelum merdeka. Terlebih sejak tahun 1965, Pemerintah (*Amir*) memberi kesempatan kepada para ahli untuk mengadakan perubahan hukum dalam bidang yang lebih luas,³⁰ di antaranya ketentuan tentang warisan (*succession*).³¹ Selain itu, Kuwait juga memiliki *Inheritance Law Reform 1971 and Further Legislation* (perbaikan/perubahan hukum kewarisan).³²

1. Bidang Perwakafan

Wakaf (*waqf* = menahan, mengekang, menghentikan). Dalam pengertian istilahnya, menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk dipergunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt.³³

Ada lima rukun dari wakaf, yaitu: *Pertama: waqif* (orang yang berwakaf), dengan syarat: 1) pemilik sah dari harta yang diwakafkan, dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) dewasa, menyadari dan mengetahui tujuan melepaskan hak miliknya kepada pihak lain; 3) tidak boleh mempunyai utang jika seluruh harta yang akan

²⁵ Musthofa, *Wasiat Wajibah*, hlm. 167.

²⁶ Grohmann, "Kuwait," hlm. 1172; lihat juga Center for Research and Studies on Kuwait, *The Aggression*, hlm. 92.

²⁷ Esposito, *The Modern World*, hlm. 5.

²⁸ Amin, *Islamic Law and Its Implication for Modern World* (Scotland, UK-Royston, 1989), hlm. 181.

²⁹ Mahmood, *Personal Law*, hlm. 88.

³⁰ Peretz, *The Middle East Today*, hlm. 489.

³¹ Mahmood, *Personal Law*, hlm. 89.

³² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 153.

³³ *Ensiklopedi Islam*, jil. 3, hlm. 168.

diwakafkan hanya cukup untuk membayar utangnya; *Kedua: mauquf* (harta yang diwakafkan) tahan lama dan bermanfaat. Pada masa Rasulullah saw., benda yang diwakafkan itu biasa berupa tanah atau kebun. Namun para ulama kemudian membolehkan barang tak bergerak lain, seperti mobil dengan syarat tahan lama dan bermanfaat bagi kepentingan umum. Bahkan mazhab Maliki dan Syi'ah membolehkan wakaf benda-benda bergerak, baik yang selamanya maupun untuk beberapa waktu yang ditentukan sesuai dengan akad wakaf yang dilakukan; *Ketiga: mauquf 'alaih* (tujuan wakaf), yaitu untuk kepentingan umum dalam upaya mencari keridhaan Allah swt.; *Keempat: sifat wakaf*, yaitu kata-kata atau pernyataan yang diucapkan orang yang berwakaf harus jelas dan lebih baik jika dilakukan secara tertulis serta ada saksi yang dianggap patut dalam akad wakaf itu; *Kelima: penerima* yang kemudian akan mengelola harta wakaf, baik perorangan maupun lembaga pengelola tanah wakaf, yang disebut *nadzir* yang mengucapkan *qabul* (penerimaan).³⁴

2. Bidang Wasiat Wajibah

Perundang-undangan yang sangat penting berhubungan dengan warisan adalah hukum *Wasiat Wajibah* (*law on obligatory bequest* atau *qanun Wasiat Wajibah*) tahun 1971, yang diundangkan tanggal 4 April 1971. Perundang-undangan ini dapat memberikan manfaat bagi cucu yang orangtuanya meninggal (*descendants of the predeceased children of deceased persons*), bahwa menurut aturan ini cucu tersebut berhak mendapat bagian. Dalam hukum kewarisan, hukum ini dikenal sebagai waris pengganti. Pembaruan hukum sejenis ini telah terjadi sebelumnya di negara-negara Arab, seperti Mesir, Maroko, Syria dan Tunisia. Setelah Kuwait memberlakukan model hukum ini, maka Algeria, Irak dan Yordania juga berbuat serupa.³⁵

Istilah *Wasiat Wajibah* dipergunakan pertama kali di Mesir melalui Hukum Waris 1946 guna menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim.³⁶ Hukum *Wasiat Wajibah* Kuwait 1971 dibuat secara sederhana yang hanya memuat empat pasal. Ketetapan ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki yang meninggal (*ibn al- ibn*) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak perempuan saja (tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya). Pemberian wasiat ini harus tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta yang ditinggalkan si mati.³⁷ Ketentuan ini

³⁴ Ibid.

³⁵ Musthofa, *Wasiat Wajibah*, hlm. 168.

³⁶ M. Atho Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1988), hlm. 163-164.

³⁷ Mahmood, *Personal Law*, hlm. 89.

meskipun menderivasi dari undang-undang Mesir; hakekatnya berangkat dari penafsiran terhadap firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S: Al-Baqarah:180).³⁸

Menurut mayoritas ulama, ayat ini dinasakh dengan ayat waris dan hadis “*lā waṣīyyata li wārisin*” (Tidak ada wasiat bagi ahli waris). Menurut *mufassir* dan *fuqaha* tradisional terhadap ayat ini, *wasīyyat* hanya diberikan kepada orangtua dan kerabat dekat. Namun, sebagian besar ahli hukum Islam memandang ayat ini di-*nasakh* oleh Q.S. al-Nisa. 4: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa:7).³⁹

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa penduduk Kuwait memeluk tiga mazhab, yaitu Maliki, Hanbali dan minoritas Syi’ah. Menurut Imam Malik, *wasīyyat* boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris. Bila yang menyetujui hanya sebagian, *wasīyyat* diambilkan dari orang yang membolehkan saja.⁴⁰ Sedang menurut Ibn Qudamah, pengikut mazhab Hanbali, *wasīyyat* kepada ahli waris apabila dikehendaki boleh.⁴¹ Sedangkan Syi’ah Imamiyah berpendapat, *wasīyyat* boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi 1/3 harta warisan.⁴²

Pendapat yang lebih tegas berasal dari kalangan mazhab Zahiri, Ibn Hazm menyatakan, wajib bagi setiap muslim ber-*wasīyyat* kepada keluarga dekat yang tidak mendapatkan

³⁸ Iwan Setiawan dan Agus Subagio, *Al-Qur’anul Karim: Tahfiz Junior* (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 27.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁰ Al-Zarqani, *al-Imam Malik*, juz 4, hlm. 86.

⁴¹ Abdillah ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), hlm. 479.

⁴² Muhammad Jawwad al-Muginiyyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamzah*, terj. Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, jil. 2 (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 240.

warisan, baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapat warisan. Pandangan ini berdasar

Q.S. al-Baqarah/2: 180⁴³ dan didukung fakta Alquran tetap mengakui adanya *wasiyyat* bila pembagian warisan masih tersisa (setelah pembayaran *wasiyyat* dan hutang).⁴⁴

Para ahli hukum Islam Mesir kontemporer memaksudkan 'keluarga dekat' dengan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya (cucu yatim),⁴⁵ maka cucu yatim diberi dengan pemberian *wasiyyat*.⁴⁶ Dasar pandangan ini adalah karena cucu yatim pada hakekatnya adalah kerabat yang menjadi tanggungjawab pewaris (ayah/ibu yang meninggal).⁴⁷ Hal ini sesuai dengan nilai ideal Islam bahwa prinsip waris hanya diperuntukkan bagi keluarga dekat yang derajatnya paling dekat dengan pewaris. Jadi pemberian *wasiyyat* kepada cucu yatim sesuai dengan prinsip ideal Islam itu.

Dalam perkembangan pembaruan hukum di Kuwait sempat terhenti pada tahun 1976 ketika terjadi ketegangan di Parlemen yang menghendaki agar kepala negara (*amir*) mengundurkan diri).⁴⁸ Akhirnya sekitar bulan Pebruari 1978, kepala negara membuat deklarasi bahwa sistem hukum Kuwait secara berangsur-angsur akan disesuaikan dengan syariat. Sebagai hasilnya tiga tahun kemudian sejumlah hukum baru dapat diselesaikan, di antaranya Undang-undang Hukum Keluarga (*Code on Personal Law* atau *Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah*). Hukum ini didasarkan pada doktrin yang dipilih dari prinsip hukum Islam dan ketetapan hukum serupa dari Mesir dan Maroko.⁴⁹ Selanjutnya pada periode tersebut juga telah disiapkan *Ensiklopedi Hukum Islam* yang diharapkan menjadi karya monumental di dunia Islam.⁵⁰ Pada tahun 1980 juga telah diundangkan *Civil Code*.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pembaruan hukum keluarga di Kuwait dapat dikatakan terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh kemerdekaan yang dicapainya juga terlambat sehingga hukum itu baru mengalami pembaruan sejak tahun 1971 dengan diundangkannya hukum tentang *Wasiyyat al-Wajibah*.

⁴³ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, dalam Ahmad Muhammad Syakir, juz 9, hlm. 314.

⁴⁴ Q.S. al-Nisa/4: 11–12 dan al-Baqarah/2: 240.

⁴⁵ N. J. Coulson, *Succession in the Muslim Family* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm. 144–145.

⁴⁶ Muhammad Mustafa Khan, *Islamic Law of Inheritance* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1989), hlm. 212.

⁴⁷ Coulson, *Succession in the Muslim Family*, hlm. 144.

⁴⁸ Esposito, *The Modern World*, hlm. 6.

⁴⁹ Musthofa, *Wasiat Wajibah*, hlm. 173.

⁵⁰ Mahmood, *Personal Law*, hlm. 90.

⁵¹ Amin, *Modern World*, hlm. 240.

Berkenaan dengan hukum keluarga yang lain, seperti aturan pernikahan dan perceraian di negara Kuwait tidak disinggung karena penulis berasumsi bahwa persoalan tersebut masuk dalam kategori privat (pribadi), sehingga negara tidak terlalu turut campur dalam kedua persoalan tersebut. Hukum Islam yang dianut mereka sudah menjadi *living law* dalam kehidupan sehari-hari, apalagi hukum Islam telah menjadi agama resmi negara Kuwait. Hal ini juga dapat dipahami bahwa kedua persoalan tersebut dapat dilihat aturannya dengan melihat mazhab yang dianut penduduknya, yaitu mazhab Maliki, Hanbali dan minoritas Syiah.

Adapun persoalan wakaf dan *Wasiat Wajibah* karena berhubungan dengan harta, maka pemerintah turut campur dalam urusan tersebut. Banyaknya praktek perwakafan di Kuwait dapat dipahami dari melihat realitas bahwa negara Kuwait kaya dengan sumber daya alamnya, kehidupan masyarakatnya sejahtera, sehingga mewakafkan sebagian harta mereka menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Kuwait. Oleh sebab itu, dengan banyaknya praktek-praktek perwakafan ini, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membuat sebuah aturan perundang-undangan, sehingga harta yang telah diwakafkan dapat diinventarisasi demi kepentingan masyarakat banyak. Begitu pula aturan *Wasiat Wajibah* diatur agar nantinya si pewaris tidak meninggalkan anak-anaknya (ahli warisnya) dalam keadaan terlunta-lunta akibat pemberian *wasiyyat* yang berlebihan kepada seseorang.

D. KESIMPULAN

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Kuwait merupakan bagian dari upaya negara untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam bidang perwakafan dan wasiyyat al-wajibah. Dalam konteks perwakafan, Kuwait mengadopsi sistem wakaf yang memisahkan antara wakaf keluarga dan wakaf sosial, mengikuti model Mesir dan Libanon, yang kemudian dikodifikasikan melalui Undang-Undang Wakaf tahun 1951. Pengaturan ini dilakukan untuk memastikan wakaf dapat memberikan manfaat publik secara optimal. Di sisi lain, hukum *wasiyyat al-wajibah* yang diundangkan pada tahun 1971 menjadi salah satu bentuk reformasi penting dalam bidang warisan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak cucu yatim dari anak laki-laki maupun perempuan agar tetap mendapatkan bagian waris meskipun orang tua mereka telah meninggal terlebih dahulu. Ketentuan ini membatasi wasiat maksimal sepertiga dari total harta warisan, serta diambil dari interpretasi terhadap nash Al-Qur'an dan ijihad mazhab. Secara umum, pembaharuan hukum keluarga Islam di Kuwait berjalan lebih lambat dibandingkan negara-negara Muslim lainnya, karena proses kemerdekaan dan modernisasi hukum yang juga terlambat. Namun, sejak tahun 1960-an,

Kuwait telah menunjukkan komitmen untuk menyusun peraturan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam, baik melalui kodifikasi hukum maupun pembentukan konstitusi negara yang menjadikan Islam sebagai dasar hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul al-Fiqh. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Abu Zahrah, Syarh Qanun al-Wasiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1978.

Adolf Grohmann, Kuwait dalam E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913–1936. Leiden–New York: E.J. Brill, 1993.

Ahmad Suwaidi, Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No.2, 2011.

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, t.th.

Amin, Islamic Law and Its Implication for Modern World. Scotland: Royston, 1989.

Center for Research and Studies on Kuwait, The Aggression on Kuwait: the Truth and the Tragedy. t.tp: 1996.

Don Peretz, The Middle East Today. New York: Prager, 1986.

Ibnu Qayyum al-Jauziyah, l'lam al-Muwaffiqin al-Rab al-'Alamin, Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ida Supriyatni, Kuwait dalam Ensiklopedi Nasional, Jil. 9. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.

J. N. D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Islam. Terj. Machnun Husain. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Keuangan Islam. Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti. Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000.

Muhammad Abid al-Kabisi, Hukum Wakaf. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Rawas Qal'ahji, et al., Mu'jam Lugah al-Fuqaha' 'Arabi - Inklizi - Afransi. Bairut: Lubnan, 1996.

P.M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewis, The Cambridge History of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Rifyal Ka'bah, Beberapa Permasalahan dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah (Hukum Keluarga) Mesir. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Sri Hidayati, Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer. *Ahkam*, Vol. XII No. 1, 2012.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972.

Tuti A. Najib dan Ridwan al Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRC, 2006.